

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebelum tahun 1930-an, aliran pemikiran liberal dari ekonom klasik mendominasi perekonomian global. Dalam aliran klasik mereka meyakini bahwa mekanisme *laissez faire* (bebas berusaha) dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara otomatis dengan tercapainya tingkat kegiatan ekonomi nasional yang optimal (*full employment*). Pada suatu saat tertentu GDP mungkin berada di bawah atau di atas tingkat *full employment*, tetapi kemudian akan segera kembali ke tingkat *full employment* secara otomatis. Sehingga intervensi pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi jangka pendek tidak diperlukan. Menurut mereka peran Pemerintah harus dibatasi seminimal mungkin, karena kinerja pihak swasta lebih efisien dari pada pemerintah.<sup>1</sup>

Mulai tahun 1930-an hingga 1970-an aliran Keynesianisme mulai menggantikan pemikiran liberal ekonomi klasik. Keynes<sup>2</sup> berpendapat bahwa sistem *laissez faire* murni tidak bisa dipertahankan. Pemerintah harus secara aktif mengendalikan perekonomian hingga mencapai *full employment*, sebab mekanisme otomatis—yang diagung-agungkan oleh penganut liberalisme—ke arah posisi tersebut tidak bisa diandalkan. Keynes percaya bahwa peran pemerintah akan berguna dan diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh mekanisme pasar tersebut.

Disaat bersamaan dengan berkembangnya pemikiran keynesianisme rezim pertumbuhan ekonomi dunia digerakan oleh Sistem Fordisme-Taylorisme (*Fordism-Taylorism System*), yaitu sebuah sistem produksi dengan pelibatan tenaga kerja secara masal dan penciptaan nilai tambah tin

---

<sup>1</sup> Boediono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE, 1982, hal. 18.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 60.

ggi melalui pengembangan teknologi yang praktis di sektor manufaktur. Sistem Fordisme-Taylorisme ini berkembang baik hingga tahun 1970-an dan berhasil membawa kemajuan perekonomian global.<sup>3</sup>

Sistem produksi masal Fordisme-Taylorisme mulai mengalami krisis terutama setelah dekade 1980-an, karena menurunnya produktivitas global dan ketidakmampuannya mewadahi pergerakan modal yang semakin cepat, termasuk di bidang finansial (keuangan). Keynesianisme yang semula menjadi paham dominan mulai tergeser oleh pola pikir neoliberalisme. Pergeseran itu menunjukkan adanya pola baru dalam sistem dan orientasi industri Negara-negara maju. Disamping terjadinya erosi peran Negara dalam ekonomi akibat internasionalisasi produksi oleh MNC (*Multi National Corporations*), pada dekade 1980-an juga terjadi evolusi yang cepat dari sebuah “sistem kapitalisme produktif” kepada sistem “kapitalisme” yang didominasi oleh kegiatan yang didasarkan oleh kemampuan mencari keuntungan dengan spekulasi di pasar modal dan pasar uang.<sup>4</sup>

Proses akumulasi modal telah bergeser dari sifatnya yang produktif kepada perjudian spekulatif, yang oleh Susan Strange disebut sebagai *Casino Capitalism*. Tiga puluh tahun yang lalu, menurut Noam Chomsky, sekitar 90 persen dari transaksi yang menggunakan valuta asing terkait dengan sektor ekonomi riil (perdagangan dan investasi jangka panjang). Namun saat ini lebih dari 90 persen transaksi itu terdiri dari aliran modal finansial jangka pendek, lebih dari 80 persennya bahkan kurang dari jangka seminggu, yang diarahkan pada spekulasi<sup>5</sup>

Ketiadaan regulasi yang ketat, mengakibatkan tindakan-tindakan spekulatif yang melahirkan gelembung ekonomi (*economy bubble*) yang akan meletus manakala

---

<sup>3</sup> Syamsul Hadi, *Negara, Pasar dan Sistem Kapitalisme Global*, dalam *Global Justice* (edisi krisis global), November 2008, hal. 8.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 9.

kepercayaan akan *claim* aktivitas produktif di masa depan itu mulai diragukan. Hal ini dimulai dengan ketidakmampuan pihak penerima kredit untuk melunasi utang jangka pendeknya. Inilah yang terjadi dengan krisis keuangan di Amerika Serikat ( AS ), krisis dimulai dengan kredit macet atau ketidakmampuan membayar kredit di sektor perumahan kelas dua ( *subprime mortgage* ). Kegagalan nasabah membayar kredit perumahan mereka kemudiah memicu penurunan tingkat kepercayaan di pasar finansial, yang mengakibatkan jatuhnya nilai saham Wall Street, yang mencatat kerugian US\$ 8,33 triliyun sejak akhir tahun 2007<sup>6</sup>

Dampak krisis ini pada awalnya hanya dirasakan di AS, tetapi karena banyak perusahaan dunia yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan AS, sehingga akhirnya dalam tempo yang cukup singkat, pengaruh krisis ini menyebar ke berbagai Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Pasar keuangan menjadi *entry point*. Sejak awal Oktober 2008, indeks saham di Jepang terkoreksi sekitar 20 persen. Hal yang sama juga melanda hamper semua psar modal di Asia. Selama sepekan, Indeks Hang Seng Hongkong turun sebesar 10,78 persen. Indeks Strait Times Singapura terkoreksi 9,53 persen dan Indeks Kосpi Korea turun 8,37 persen.<sup>7</sup>

Setelah kejatuhan harga saham, ancaman berikutnya adalah laju inflasi yang sangat tinggi, hampir seluruh negara mengalami inflasi. Laju inflasi yang tinggi mengakibatkan daya beli masyarkat melemah, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), dsb. Hingga agustus 2008, dampak krisis mengakibatkan jumlah pengangguran di Inggris melejit menjadi 1, 79 juta orang atau 5,7 persen dari angkatan

---

<sup>6</sup> *Tempo*, 19 Oktober 2008.

<sup>7</sup> Mudjarat Kuncoro, dkk, *Memahami Krisis Keuangan Global, Bagaimana Harus Bersikap*, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2008. Hal. 13

kerja. Menurut *International Labour Organization (ILO)*<sup>8</sup>, inilah tingkat pengangguran terparah sejak Juli 1991

Dampak selanjutnya dari krisis keuangan ini adalah perlambatan ekonomi dunia. Hampir seluruh negara didunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Laporan kuartal IV 2007, ekonomi Singapura yang biasanya tumbuh sekitar 9 persen, anjlok menjadi 6 persen. Pada tahun 2008, IMF memprediksi bahwa perekonomian Amerika Serikat, melemah tumbuh sebesar 1,3 persen pada tahun 2008 dari sebelumnya sebesar 2,7 persen pada tahun 2007. Demikian pula, negara-negara di kawasan Eropa, mengalami penurunan dari 2,6 persen pada tahun 2007 menjadi 1,4 persen pada 2008.<sup>9</sup>

Besarnya pengaruh dampak krisis di tiap Negara tentu saja beragam, tergantung pada seberapa besar jumlah uang yang diinvestasikan di perbankan maupun *investment bank* AS, serta nilai perdagangan langsung ( ekspor – impor ) Negara yang bersangkutan dengan AS. Di Asia, Negara-negara seperti Singapura, Hongkong, India, Jepang dan China misalnya akan mengalami dampak yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Sedangkan di Eropa, banyak perusahaan maupun perbankan yang juga terkena imbas krisis keuangan global ini karena keterkaitan mereka yang erat dengan berbagai bank maupun *investment bank* di Amerika Serikat

Karena nilai dan dampak krisis ini begitu besar, maka diperlukan juga strategi dan aksi untuk mengatasi dampak krisis ini secara global, melibatkan seluruh atau setidaknya sebagian besar, pelaku ekonomi dunia, pengusaha, pemerintah, maupun lembaga-lembaga keuangan internasional.

---

<sup>8</sup> <http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/global.htm>. Data diunduh pada bulan Juni 2009

<sup>9</sup> Op Cit. Hal.11

G-20 sebagai sebuah institusi internasional, memiliki posisi strategis dalam merespon gejolak krisis keuangan global ini. Karena pembentukan G-20 pada bulan September 1999 juga dipicu oleh pengalaman pahit krisis moneter di Asia Tenggara dan G-20 memiliki tujuan utama sebagai forum dialog antara negara maju dan negara berkembang untuk menjaga stabilitas keuangan internasional. Selain itu, komposisi anggota G-20 yang sangat potensial, anggota G-20 mewakili perekonomian utama negara-negara dunia di setiap regional, merupakan 90 persen dari GNP global, serta 80 persen dari volume transaksi internasional. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan G-20 dalam rangka merespon krisis keuangan global sangat menentukan.

Pertemuan para kepala negara anggota G-20 di Washington DC pada bulan November 2008 merupakan bukti keseriusan negara-negara anggota G-20 dalam menghadapi ancaman krisis keuangan global ini. Pertemuan ini juga mencerminkan bahwa G-20 memiliki posisi yang menentukan arah kebijakan guna mencari solusi krisis. Hingga pada akhir pertemuan, disepakati deklarasi Washington yang memuat kebijakan-kebijakan strategis yang hendak ditempuh oleh G-20.

Kebijakan-kebijakan G-20 untuk memperbaiki sistem keuangan internasional akan sangat diharapkan mampu memperbaiki tata kelola keuangan internasional di masa depan. Hal ini sangat menarik, karena dunia tidak hanya mengalami krisis keuangan sekarang ini saja, tetapi juga pernah mengalami beberapa kali di masa lalu. Sebagai contoh pada tahun 1930-an, terjadi *Great Crash* di pasar modal New York dan *Great Depression* (kegagalan perbankan) di Amerika Serikat, yang menyebabkan produksi bersih negara (*net national product*) terpankaskan hingga lebih dari setengahnya. Para ekonom menyatakan bahwa krisis keuangan global ini mirip dengan kejadian 1930. Dua kejadian datang bersamaan. *Pertama*, kepanikan di pasar keuangan. *Kedua*, lonjakan harga minyak. Pada tahun 2008, dampak krisis kredit perumahan di Amerika Serikat

telah meluas ke berbagai sektor sehingga meningkatkan kepanikan dari para pelaku ekonomi, terutama di pasar keuangan. Selain itu, harga minyak yang terus-menerus melambung hingga mencetak rekor tertinggi, yaitu menentuhkan harga 110 dollar AS per barrel.

Selain krisis tahun 1930, dunia juga pernah beberapa kali mengalami krisis keuangan diantaranya, pada tahun 1931 Austria mengalami krisis perbankan, akibatnya kejatuhan perbankan di Jerman, yang kemudian berfluktuasinya mata uang internasional. Hal ini membuat Inggris meninggalkan standar emas. Pada tahun 1944-1946 Hungaria mengalami hyper-inflation dan krisis moneter. Ini merupakan krisis terburuk Eropa. *Note issues* Hungaria meningkat dari 12000 milion (11 digits) hingga 27 digits. Tahun 1978-1980 *Deep recession* di negara-negara industri akibat boikot minyak oleh OPEC, yang kemudian membuat melambung tingginya tingkat suku bunga di negara-negara industri. Tahun 1980 juga terjadi krisis di dunia ketiga, banyaknya hutang dari negara dunia ketiga disebabkan oleh *oil booming* pada tahun 1974, tapi ketika negara maju meningkatkan tingkat suku bunga untuk menekan inflasi, hutang negara ketiga meningkat melebihi kemampuan bayarnya. Pada tahun 1987 *Great Crash* kembali terjadi di pasar modal Amerika Serikat dan Inggris yang mengakibatkan otoritas moneter dunia meningkatkan cadangan uang<sup>10</sup>.

Krisis ekonomi yang terjadi di Asia merupakan contoh terdekat yang menunjukkan bahwa dunia selalu dibayang-bayangi oleh krisis. Pada tanggal 2 Juli 1997 Thailand mengumumkan kebijakan nilai tukar mengambang bagi mata uang mereka, yaitu baht. Pada tahun 1998, baht terdepresiasi hingga sebesar 113 persen. Mengambangnya nilai tukar baht menjadi awal pemicu bagi keruntuhan ekonomi di

---

<sup>10</sup> *Krisis keuangan dunia abad 20* dalam Global Justice (edisi krisis global), November 2008, hal. 17

kawasan Asia Tenggara. Krisis segera menyebar ke Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan.

Pengaruh krisis di Thailand tidak hanya di kawasan Asia Tenggara saja, akan tetapi mulai menyebar ke negara lainnya. Pada tanggal 18 Agustus 1998, Pemerintah Rusia mengumumkan kebangkrutannya pada pasar obligasi domestik. Antara bulan Juli 1998 hingga Januari 1999, mata uang Rusia menalami depresiasi sebesar 262 persen. Sementara itu, pada bulan September 1999 merupakan momentum bagi bangkrutnya para manajer investasi dengan ambruknya *Long Term Capital Management (LTCM)*, sebuah lembaga paling besar di dunia pada waktu itu.<sup>11</sup>

Memperhatikan posisi strategis G-20 sebagai forum internasional yang berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan internasional dan dengan kenyataan bahwa dunia pernah beberapa kali mengalami krisis keuanan dan mungkin akan terus dibayangkan oleh ancaman krisis, maka penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan G-20 untuk merespon krisis keuangan global ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah yang menarik dan bermanfaat. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul **“Kebijakan G-20 Merespon Krisis Keuangan Global 2008”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kebijakan G-20 sebagai bagian dari institusi internasional dalam merespon krisis keuangan global 2008?.

## **C. Kerangka Dasar Teoritik**

---

<sup>11</sup> A. Prasetyantoko, BENCANA FINANSIAL, Stabilitas Sebagai Barang Publik, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008. Hal.23

Sebagai kerangka berpikir, penulis akan menggunakan teori Neoliberalisme institusional dari Robert Keohane. Teori ini diharapkan mampu menjelaskan secara garis besar peran G-20 dalam rangka menciptakan sebuah rezim ekonomi internasional yang secara khusus mengatur tata kelola keuangan internasional.

### **Teori Neoliberalisme Institusional**

Neoliberalisme yang menjadi induk teori dari neoliberalisme institusional memiliki asumsi dan preposisi yang mendasar. Ada enam asumsi dasar yang menjadi fondasi dari neoliberalisme, yakni *pertama*, neoliberalisme menyakini bahwa negara merupakan aktor yang paling penting dalam hubungan internasional. *Kedua*, negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dalam pemahaman neoliberal adalah sebagai aktor rasional. *Ketiga*, politik internasional sering kali ditandai oleh masalah aksi bersama (*collective action problem*). *Keempat*, politik internasional secara substansi ditentukan oleh struktur kepentingan negara. *Kelima*, politik internasional juga dipengaruhi oleh karakter anarki dari sistem internasional. *Keenam*, dampak dari struktur kepentingan negara dan anarki dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya, jumlah aktor, institusi internasional dan tingkat ketergantungan.

Neoliberalisme institusional ini merupakan salah satu varian dari liberalisme. Robert Keohane dan Josep Nye adalah dua pemikir yang memberikan pengaruh yang besar dalam pengembangan teori ini. Neoliberalisme Institusional menyatakan bahwa institusi internasional menolong memajukan kerjasama di antara negara-negara<sup>12</sup>.

Kerjasama negara-negara dalam sistem internasional yang anarki dalam wadah institusi internasional menjadi kajian pokok dari teori ini. Kaum neoliberal memandang adanya sebuah institusi ditujukan sebagai mediator atau perantara untuk mencapai

---

<sup>12</sup> Robert Jackson dan Gorge Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 155

kerjasama diantara aktor dalam sistem internasional. Karena kompleksitas dan intensitas hubungan antara negara yang semakin tinggi, maka berbagai permasalahanpun kerap kali mengiringinya. Hal itu ditambah lagi dengan kepentingan yang beragam dari setiap negara memungkinkan terjadinya persinggungan kepentingan yang bisa berujung pada konflik. Oleh karena itulah peran sebuah institusi sangat penting dalam rangka menjamin kerjasama, atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan.

Apakah institusi internasional itu? Menurut kaum liberal institusional adalah suatu organisasi internasional, seperti NATO atau Uni Eropa atau merupakan seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu, seperti penerbangan atau pengapalan. Seperangkat aturan ini juga dapat disebut “rejim”, rejim perdagangan, sebagai contoh, dibentuk terutama oleh *World Trade Organization* (WTO)<sup>13</sup>. Secara lebih spesifik Robert Keohane mendefinisikan Institusi internasional sebagai seperangkat peraturan (formal dan informal) yang saling berhubungan dan berkesinambungan yang akan menjelaskan pola tingkahlaku negara, aktivitas yang memaksa, dan bentuk-bentuk harapan. Institusi internasional—sebagaimana penjelasan diatas—dapat diartikan sebagai salah satu dari tiga bentuk<sup>14</sup> :

1. Organisasi formal antara pemerintah atau organisasi antar negara non pemerintah. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan khusus, organisasi ini bisa mengawasi aktivitas dan memberikan respon terhadap aktivitas tersebut. Organisasi ini dibentuk oleh negara-negara.

## 2. Rejim Internasional

---

<sup>13</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, op.,cit, hal 154

<sup>14</sup> Robert O. Keohane, *International Institutions and State Power (Essay in International Relations Theory)*, London: Westvie Press, 1989, hal. 3-4

Rejim adalah insitisi yang memiliki peraturan eksplisit yang disetujui oleh negara-negara. Peraturan-peraturan tersebut dihubungkan dengan beberapa isu-isu hubungan intrnasional. Sebagai contoh, rejim IMF yang dibentuk di Bretton Woods pada tahun 1944, serta rejim Hukum kelautan yang diprakarsai oleh PBB pada tahun 1970-an.

### 3. Konvensi

Dalam teori sosial dan filosopi, konvensi adalah institusi informal yang memiliki peraturan dan kesepahaman yang implisit yang membentuk harapan dari para aktor-aktor yang terlibat. Konvensi memungkinkan aktor-aktor tersebut untuk memahami aktor yang lain tanpa adanya peraturan yang eksplisit, guna mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka. Sebagai contoh, prinsip kekebalan (*immunity*) diplomasi tradisional merupakan sebuah konvensi sebelum dikodifikasi dalam dua perjanjian internasional pada tahun 1960an.

Institusi internasional memiliki beberapa peran penting. Robert Keohane menyatakan bahwa Peran institusi adalah

- a. Menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi.
- b. Meningkatkan kemampuan pemerintah memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri—oleh karena itu kemampuannya membuat komitmen yang dapat dipercaya berada di urutan pertama.
- c. Memperkuat harapan (level ekspekasi) yang muncul tentang kesolidan dari kesepaktan internasional.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 2

Neoliberalisme institutional tidak menyatakan bahwa persetujuan internasional dapat dibuat atau dipertahankan dengan mudah, justru sebaliknya. Klaim yang dikemukakan oleh neoliberalis adalah bahwa kemampuan negara untuk berkomunikasi dan bekerjasama tergantung pada institusi yang dibentuk. Bagi neoliberalis negara merupakan pusat interpretasi dari politik internasional, sama seperti realis. Tetapi bagi neoliberalis baik aturan formal maupun informal memainkan peranan penting dalam membentuk tingkah laku negara.<sup>16</sup>

Perspektif neoliberalisme institutional dapat dikatakan relevan pada sistem internasional jika memenuhi dua kondisi. *Pertama*, para aktornya harus mempunyai kepentingan-kepentingan yang saling menguntungkan, hal ini berarti bahwa para aktor tersebut harus memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang mereka lakukan. Kondisi *kedua* terhadap relevansi dari pendekatan institusional adalah jenis-jenis dari tingkat institusionalisasi yang memberikan pengaruh substansial terhadap tingkah laku negara<sup>17</sup>.

Kondisi pertama untuk menilai relevansi suatu institusi dalam hal ini G-20 maka dapat dijelaskan sebagai berikut. G-20 sebagai sebuah institusi internasional memberikan ruang bagi dialog informal diantara negara maju dan negara berkembang. Sedikitnya forum yang menjembatani antara negara maju dan negara berkembang menyebabkan komunikasi diantara kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik, dengan adanya G-20 maka aspirasi dari negara-negara berkembang dapat didengarkan oleh negara maju. Dengan demikian diharapkan adanya kesepahaman mengenai isu-isu internasional yang sedang terjadi dan pada akhirnya aspirasi dari kedua belah pihak dapat dikompromikan sehingga dapat memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 2-3

Kondisi kedua, mengenai pengaruh institusi terhadap perilaku negara. G-20 sebagai forum dialog informal memungkinkan tercapainya konsensus mengenai berbagai isu internasional. Dengan bentuk dialog informal dan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dengan jalan konsensus, maka kesediaan negara-negara anggota untuk melaksanakan keputusan institusi bersifat suka rela dan tanpa memaksa. Dengan kondisi seperti ini, maka implementasi dari keputusan akan sangat tergantung pada masing-masing anggota G-20.

Tingkat institusionalisasi sebuah lembaga dapat diukur dengan menggunakan tiga dimensi, sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Kebersamaan (*commonality*) : derajat dimana harapan-harapan terhadap perilaku dan pemahaman yang tepat mengenai bagaimana menginterpretasikan tindakan dibagi bersama oleh partisipasi dalam sistem tersebut.
- b. Kekhususan (*specificity*): derajat dimana harapan-harapan ini jelas khusus dalam bentuk aturan-aturan
- c. Otonom (*autonomy*): perluasan dimana institusi dapat mengubah aturannya sendiri daripada bergantung pada badan-badan dan agen-agen asing (negara) untuk melakukan hal tersebut.

Tiga dimensi untuk mengukur tingkat institusionalisasi tersebut diatas menjadi standar penilaian terhadap efektivitas sebuah institusi dalam mencapai tujuannya G-20 yang merepresentasikan kekuatan perekonomian dunia terdiri dari 19 negara ditambah Uni Eropa memiliki kekuatan potensial bagi dialog kerjasama internasional. Sifat informal dari G-20 memudahkan institusi ini untuk mencapai konsensus diantara negara anggota. Dengan demikian arti kebersamaan (*communality*) menjadi hal penting yang

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hal 4-5

berlaku pada negara anggota G-20, mereka berdialog dengan prinsip kesetaraan. Kesamaan perspektif mengenai sebuah isu dapat didialogkan secara lebih leluasa. Dimensi kekhususan dari G-20 tercermin dari tujuan awal pendirian organisasi, yakni sebagai forum dialog informal diantara negara maju dan negara berkembang untuk membahas masalah stabilisasi keuangan internasional. Dimensi selanjutnya, yakni otonomi, maka G-20 sebagai forum informal tidak memiliki hubungan formal dengan insitusi internasional lainnya, sehingga G-20 bebas membuat kesepakatan-kesepakatan tanpa intervensi dari institusi internasional lainnya.

#### **D. Hipotesis**

G-20 sebagai suatu institusi internasional akan memainkan perannya sebagai salah satu rezim keuangan internasional. KTT G-20 di Washington dan London menegaskan peran G-20 dengan disepakatinya beberapa prinsip umum bagi reformasi sistem keuangan internasional. Peranan G-20 yang ditindaklanjuti dengan serangkaian kebijakan guna mengatasi krisis keuangan global adalah:

1. Menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi dengan kebijakan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan keamanan regulasi, dan mempromosikan integritas pasar keuangan.
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri dengan kebijakan memperkuat kerjasama internasional
3. Memperkuat harapan yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan internasional dengan kebijakan mereformasi institusi keuangan internasional.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Mengetahui permasalahan utama dalam krisis global tahun 2008;
2. Mengetahui kebijakan-kebijakan G-20 dalam merespon krisis keuangan global.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Guna memfokuskan penelitian, maka ruang lingkup penelitian akan dibatasi pada kebijakan G-20 antara bulan November 2008 sampai April 2009, sebagaimana termuat dalam deklarasi Washington, 15 Nopember 2008 dan *London Summit Leader's Statetment* 2 April 2009, serta berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh G20.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Oleh karena itu, data yang diperoleh dan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literature-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, dokumen-dokumen resmi ( *official* ) maupun tidak resmi / pendukung ( *unofficial* ) yang diterbitkan maupun tidak ( hanya dipublikasikan melalui media massa ) dan sumber-sumber lainnya yang dianggap memiliki relevansi.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini akan diuraikan dalam empat bab, dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat ketentuan metodologis yang meliputi: Latar belakang masalah; Rumusan masalah; Kerangka dasar teoritik; Hipotesis; Tujuan penelitian; Ruang lingkup penelitian; Teknik pengumpulan data; Sistematika penulisan;

## **BAB II KRISIS KEUANGAN GLOBAL 2008**

Bab ini membahas seputar krisis global yang meliputi: krisis subprime mortgage; kolapsnya lembaga keuangan dan perbankan AS; ambruknya pasar modal internasional; serta dampak krisis terhadap perekonomian dunia.

## **BAB III GAMBARAN UMUM G-20**

Bab ini membahas seputar krisis global yang meliputi: Latar belakang; Struktur organisasi; Visi dan misi; G-20 dan insitutsi internasional lainnya; Kebijakan G-20; Efektivitas G-20.

## **BAB IV KEBIJAKAN G-20**

Bab tiga ini, membahas seputar kebijakan G-20 dalam rangka merespon krisis global. Pembahasan itu meliputi: KTT Para Pemimpin G-20, Washington dan London serta Kebijakan G-20 merespon krisis keuangan global yang terdiri dari memperkuat transparansi dan akuntabilitas; meningkatkan keamanan regulasi; mempromosikan integrasi pasar keuangan; memperkuat kerjasama internasional; mereformasi institusi keuangan internasional.

## **BAB IV KESIMPULAN**